

**PENGARUH DEWAN INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN
KUALITAS AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

NURIZA RAMADHANI MARTA

NIM: 2015310223

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE PERBANAS

SURABAYA

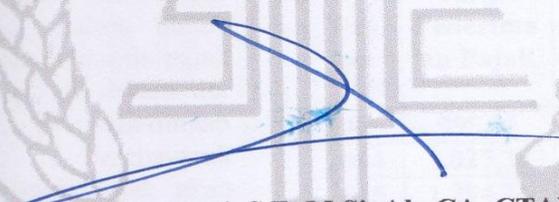
2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

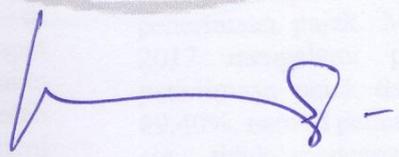
Nama : Nuriza Ramadhani Marta
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 06 Februari 1997
NIM : 2015310223
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit & Perpajakan
Judul : Pengaruh Dewan Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 22 April 2019


(Supriyati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal: 22 April 2019


(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

PENGARUH DEWAN INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Nuriza Ramadhani Marta
STIE Perbanas Surabaya
Email: nurisamarta@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of independent board, audit committee, and audit quality on tax avoidance of manufacturing companies. The object of this research is the manufacturing company that is in Indonesia Stock Exchange during the period 2013-2017. The sample of this study as many as 488 of 699 are selected in accordance with the criteria of researchers. Sample collection method in this research is purposive sampling. Methods of data analysis using multiple regression analysis. The results showed that audit quality had an effect on tax avoidance while independent board and audit committee had no effect on tax avoidance.

Keywords : tax avoidance, independent board, audit committee, and audit quality on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran secara paksa yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak kepada negara dan sumber penerimaan negara yang paling utama yang diperoleh dari seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selain itu, pajak dapat dikatakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan disalurkan kembali oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Proses pengembangan sarana dan pembangunan negara membutuhkan pendapatan yang tinggi. Namun, penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah belum sesuai dengan target yang telah dianggarkan. Pada informasi penerimaan pajak, masih terjadi penurunan penerimaan pajak yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada prosentase capaian penerimaan pajak yang diterima oleh negara yang tiap tahun mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh negara.

Persentase Capaian Penerimaan Pajak dalam triliun rupiah

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian penerima an pajak (%)
2013	995,21	921,27	92,57%
2014	1.027,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%

Sumber : www.pajak.go.id

Berdasarkan tabel diatas bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pembayaran pajak masih rendah, terutama pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun pada tahun 2017 mengalami peningkatan capaian penerimaan pajak dari 81,60 % menjadi 89,40%, namun pencapaian ini tidak sesuai atau tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun pendapatan

pajak yang masuk dalam kas negara masih kurang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah diterapkannya program *tax amnesty* namun hal ini tidak menumbuhkan kepatuhan bagi wajib pajak dan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Wajib pajak memiliki alternatif lain untuk tidak membayar beban pajak dengan sewajarnya, dimana wajib pajak memilih untuk menyimpan kas dalam Bank.

Pembayaran pajak yang lebih tinggi membuat wajib pajak melakukan beberapa upaya pembayaran efisiensi pajak seperti penghindaran pajak yang merugikan dan akibatnya akan mengurangi pendapatan bagi negara dan menurut sudut pandang wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi pengurang pendapatan.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang dihitung dari laba bersih yang didapatkan. Apabila semakin besar kewajiban pembayaran pajak perusahaan, maka penerimaan pendapatan pajak yang diperoleh negara mencapai maksimal, sedangkan apabila semakin kecil pembayaran pajak maka penerimaan pendapatan pajak yang diperoleh negara semakin kecil. Namun kondisi seperti ini akan bertentangan antara tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pemerintah dengan tujuan perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak sehingga memperoleh tingkat keuntungan yang lebih besar.

Pada tahun 2013 terdapat kasus yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Dalam kasus ini, laporan pajak TMMIN menyatakan bahwa nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun disisi lain pihak Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi 34,5 triliun. Oleh karena itu, terdapat selisih nilai koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat tindakan kecurangan untuk meminimalkan laba yang diterima sehingga akan

berpengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan. Hal tersebut merupakan salah satu strategi dalam meminimalkan beban pajak namun tetap sesuai dalam peraturan perpajakan. (nasional.kontan.id)

Peranan *management* didasarkan pada *agency theory* yang menggambarkan hubungan badan atau pemegang saham (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan kewenangan untuk pengambilan keputusan (*Jensen & Meckling, 1976*). Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara agen (*management*) dengan pemilik (*principal*) yang mempunyai kepentingan berbeda yaitu *principal* akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya namun, manajemen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan manfaat *principal* dan untuk memenuhi kepentingan pribadi, sehingga manajemen akan melakukan cara untuk memaksimalkan laba yang diperoleh

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan, baik didalam negeri maupun luar negeri seperti Reza Jamei (2017), Waluyo (2017), Yuniarwati *et al.*, (2017), Chelsea (2017), Vivi & Winnie (2016), Christopher (2015), Fitri (2015), Hairul *et al.*, (2014), Sean T. McGuire (2014), Fenny (2014), Michelle Hanlon dan Heitzman (2010) dan lain-lain.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai *tax avoidance* memperoleh hasil yang berbeda-beda. Peneliti bermaksud melakukan pengujian kembali tentang *tax avoidance*, tetapi menggunakan sampel sektor perusahaan yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur.

Faktor-faktor yang menyebabkan *tax avoidance* sangat banyak. Penelitian yang dilakukan Waluyo (2017), Vivi (2016) dan Fenny (2014) yang menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meneliti tentang faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti dewan independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,

kompensasi eksekutif, dan karakter eksekutif. Hasil yang diperoleh menggunakan model regresi menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh dewan independen, komite audit dan kualitas audit. Faktor yang lain tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di tiap perusahaan kadang berbeda. Penelitian ini menggunakan faktor dewan independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas dan masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

Pertama, apakah dewan independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

Kedua, apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

Ketiga, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak. Agen adalah pihak manajemen yang melakukan aktivitas operasional perusahaan, sedangkan *principal* adalah pemegang saham. Teori keagenan juga menyiratkan bahwa ada asimetri informasi dan *moral hazard* antara manajer sebagai agen dan *principal* sebagai pemilik utama. Anthony & Govindarajan (2009), mengatakan bahwa dalam teori agensi setiap individu akan melakukan manfaat untuk kepentingan

sendiri. Teori agensi merupakan hubungan antara manajemen dan pemilik yang mempunyai kepentingan berbeda, sehingga diperlukan kontrak kerja dan kesepakatan antara pemilik dan manajemen dengan tujuan untuk memaksimalkan *utilitas principal* dan menjamin agen untuk memperoleh reward dari hasil aktivitas operasional perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat pemilik (*principle*) dengan kendala dan insentif yang diterima oleh pihak manajemen (*agent*). Teori agensi menunjukkan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principle*). Kinerja perusahaan yang telah tercapai akan diinformasikan oleh manajemen (*agent*) kepada pemilik (*principle*) dalam bentuk laporan keuangan. Namun, agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principle*, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi.

Manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen. Seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik kepada manajer pada model *principal-agent*.

Adanya konflik kepentingan antara keduanya adalah suatu hal yang memicu munculnya teori keagenan (Rusydi & Martani, 2014). Oleh karena itu, dalam rangka untuk tujuan pemilik manajemen, pemilik (*principle*) harus memberikan insentif yang tepat untuk memotivasi para agen dalam melakukan pengawasan untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu biaya agensi akan terjadi karena situasi seperti ini. Biaya agensi timbul dari teori keagenan (Rusydi & Martani, 2014).

Meminimalkan biaya keagenan merupakan tantangan bagi dewan direksi dan pemegang saham untuk memikirkan cara-cara dan memberikan insentif yang

tepat untuk membuat biaya keagenan menjadi minimum (Jensen & Meckling dalam Hanlon & Heitzman, 2010). Konflik keagenan dapat mempengaruhi perlakuan Penghindaran pajak (Zemzem & Ftouhi, 2013). Masalah keagenan mungkin terjadi ketika ada perbedaan kepentingan agen dan ketika *principal* memiliki perilaku penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena, manajemen ingin meningkatkan kompensasi melalui keuntungan yang lebih tinggi, sedangkan pemegang saham lainnya ingin mengurangi biaya pajak melalui keuntungan yang lebih rendah.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya pendapatan pajak, pemerintah dapat menjalankan program dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum. Lanis & Richardson (2012), menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha untuk meminimalisasi pajak dengan melakukan *tax avoidance*.

Penghindaran pajak atau dapat disebut juga sebagai *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan, sehingga dapat memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham (Desai & Dharmapala, 2006). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, (1) perencanaan pajak substantif yang mentransfer subjek pajak dan objek pajak ke surga pajak atau pemerintah telah memberikan perlakuan pajak khusus; (2) perencanaan pajak formal yang membela substansi ekonomi dari transaksi dengan memilih transaksi formal yang dapat

memberikan persyaratan pajak yang lebih rendah; (3) peraturan penghindaran pajak terhadap transaksi transfer pricing, kapitalisasi tipis, perjanjian belanja dan dikendalikan perusahaan asing (Darussalam & Septriadi, 2009).

Menurut Abdul Halim (2007 : 8) faktor penyebab dari penghindaran pajak meliputi tarif pajak yang tinggi, hukuman yang tidak memberikan efek jera, undang-undang yang tidak tepat, dan ketidakadilan yang nyata. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) terdapat beberapa cara dalam pengukuran *tax avoidance* yang umumnya digunakan, yaitu : (1) *GAAP ETR*, (2) *Current ETR*, (3) *Cash ETR*, (4) *Long-run cash ETR*, (5) *ETR Differential*, (6) *DTAX*, (7) *Total BTD*, (8) *Temporary BTD*, (9) *Abnormal total BTD*, (10) *Unrecognized tax benefit*, (11) *Tax Shelter activity*, (12) *Marginal tax rate*. Pada penelitian ini *tax avoidance* dilakukan dengan pengukuran *GAAP ETR*. Pengukuran ini digunakan bertujuan untuk mengetahui total beban pajak penghasilan secara keseluruhan dimana total beban pajak penghasilan diperoleh dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan, sehingga dapat diukur besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dari besarnya total beban pajak penghasilan yang dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Besar atau kecilnya nilai yang dihasilkan maka akan menentukan besarnya beban pajak yang dilaporkan jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak dimana semakin kecil nilai yang ditunjukkan maka akan semakin kecil beban pajak yang dilaporkan dan perusahaan dianggap melakukan perencanaan pajak agar beban pajak yang dibayarkan sedikit.

Dewan Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris atau perusahaan publik menyatakan bahwa dewan independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai dewan independen dimana salah satu dari persyaratan tersebut yaitu bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai dewan independen pada periode berikutnya..

Menurut KNKG (2006) menyatakan bahwa dewan independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan. Dewan independen memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya GCG dalam kegiatan usaha, melakukan pengawasan (mengarahkan, memantau dan mengevaluasi) tugas dan tanggung jawab direksi. Dewan independen juga bertanggungjawab untuk mengawasi dan meninjau kinerja manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan obyektif (KNKG, 2006). Dewan independen dapat diukur menggunakan proporsi anggota dewan independen pada suatu perusahaan.

Kehadiran dewan independen juga akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pengawasan ketat yang dilakukan oleh dewan independen akan mengurangi kesempatan manajer dalam

melakukan agresivitas pajak dengan maksud meningkatkan laba perusahaan dengan mengurangi pembayaran pajak, sehingga proporsi dewan independen pada perusahaan akan mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah dewan independen dapat memenuhi perannya sebagai pengawas, sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan yang akan dilakukan oleh manajemen.

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (BAPEPAMLK, 2012). Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota, ketua komite audit, jumlah anggota komite audit yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya terdiri dari komisaris atau pelaku profesi. Anggota komite audit harus dari pihak eksternal yang independen.

Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya terdiri dari komisaris atau pelaku profesi. Anggota komite audit harus dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal yang dimaksud adalah pihak luar perusahaan yang tidak termasuk komisaris, direksi, dan karyawan. Sedangkan independen merupakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama. Komite audit memiliki fungsi yang berjalan secara efektif, sehingga pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan menjadi lebih baik (Andriyani, 2008). Pohan (2008), menyatakan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota, ketua komite audit, jumlah anggota komite audit yang

diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Kehadiran komite audit juga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yaitu kegiatan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan adanya pengawasan ketat dan independen yang dilakukan oleh anggota komite audit sehingga akan mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang rendah, maka semakin tinggi tingkat kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan tingkat tugas dan tanggungjawab serta tingkat independensi komite audit juga menjadi rendah sehingga akan memberikan kesempatan manajemen untuk melakukan tindak kecurangan terhadap laporan keuangan yang akan mempengaruhi besaran beban pajak yang dibayarkan.

Kualitas Audit

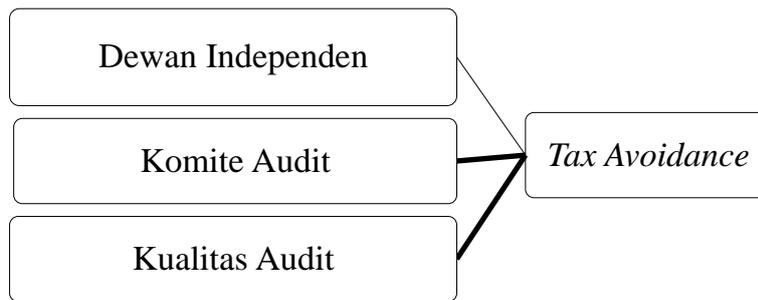
Kualitas Audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan dikatakan berkualitas jika memenuhi standar pengauditan yang mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan audit. De Angelo (1981) dalam Suharsono (2018) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor. Pemakai laporan keuangan lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi dibandingkan auditor

yang kurang berkualitas. Selain itu, transparansi dalam penyajian laporan keuangan juga merupakan elemen penting dari tata kelola perusahaan yang baik terkait dengan perpajakan yang bertanggung jawab kepada pemegang saham (Yuniarwati *et al.*, 2017).

Laporan keuangan yang telah diaudit akan digunakan untuk pembuat keputusan. Oleh karena itu, kualitas audit harus dipertahankan oleh auditor sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* terdiri dari *Deloitte*, *PricewaterhouseCoopers* (PwC), *Ernst & Young* (EY) and *KPMG* yang memiliki kualitas tinggi dibandingkan Kantor Akuntan Publik *Non Big Four* (Watts & Zimmerman, 1983).

Laporan keuangan yang telah diaudit akan digunakan sebagai pembuat keputusan pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit harus dipertahankan oleh auditor sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four* memiliki tingkat penipuan yang lebih rendah, sehingga informasi tersebut bersifat transparan. Dengan demikian, semakin rendah kualitas audit maka semakin tinggi kecurangan dalam laporan keuangan yang tidak dapat terdeteksi, sehingga perusahaan memiliki peluang yang besar untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi besaran pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti terlihat pada Gambar 1



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Dewan independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

H₂ : Komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ : Kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017 yang dapat diperoleh dari (www.idx.co.id).

Identifikasi Variabel

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu:

Variabel Independen

Dewan Independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan

direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan. Variabel ini dapat diukur menggunakan proporsi dewan independen yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan, rumus dari proporsi dewan independen :

$$\frac{\text{Jumlah anggota dewan independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang memiliki tanggungjawab dalam pengawasan proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Variabel ini dapat diukur menggunakan jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan dikatakan berkualitas jika memenuhi standar pengauditan yang mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan audit. Pelayanan audit pada laporan keuangan *The Big Four* atau *Non Big Four* dapat mempengaruhi kualitas audit. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, apabila laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh KAP *Big four* maka diberi angka 1 sedangkan perusahaan yang

laporan keuangan diaudit oleh KAP *Non big four* maka akan diberi angka 0

Variabel Dependen

Tax Avoidance adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. *Tax avoidance* diukur menggunakan *GAAP ETR*, rumus dari *GAAP ETR* adalah:

$$GAAP ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*

Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, maka kriteria-kriteria yang harus dipenuhi diantaranya :

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017

Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan tahunan auditan lengkap pada periode 2013-2017 dan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel data yang dibutuhkan.

Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada periode 2013-2017.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan pengujian yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh untuk masing-masing variabel penelitian tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu dewan independen, komite audit dan kualitas audit. Statistik deskriptif berusaha menggambarkan atau menjelaskan berbagai karakteristik data, seperti rata-

rata (mean), maximum (max) dan minimum (min).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk menguji model regresi, apakah di dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau dapat dikatakan sebagai residual yang memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov (2-tailed)* dengan pengujian $\alpha = 0,05$. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka dinyatakan terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikan $< 0,05$ dinyatakan tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila ditemukan adanya hubungan saling berkorelasi antar variabel independen, maka variabel-variabel tersebut dikatakan tidak ortogonal. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance rendah maka sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/\text{tolerance}$). Apabila *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *Tolerance Value* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya. Uji ini tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya Untuk mendeteksi

terjadi atau tidaknya korelasi dapat dilakukan dengan melakukan Uji *Run Test*. Jika hasil uji menunjukkan > 5% atau 0,05 maka data yang diuji menunjukkan tidak terjadi autokorelasi, namun jika hasil uji menunjukkan < 5% atau 0,05 maka data terjadi autokorelasi

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Model regresi yang baik merupakan model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat melakukan *Uji Glejser*. *Uji Glejser* mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel dependen. Jika secara statistik hasil variabel independen mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh antara variabel independen dengan ketiga variabel independen. Tujuan analisis berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel independen yang diketahui, untuk meramalkan nilai variabel independen.

Model regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$ETR = \alpha + \beta_1 DI + \beta_2 KA_1 + \beta_3 KA_2 + e$$

Keterangan :

ETR : *Tax avoidance*
 α : Konstanta Regresi
 $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi
DI : Dewan Independen
KA₁ : Komite Audit
KA₂ : Kualitas Audit

Pengujian Hipotesis

Uji F

Analisis regresi dengan *multivariate* menggunakan metode uji F dengan taraf signifikansi 5 persen. Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah dari semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model ini terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan melalui perhitungan dengan program SPSS.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 < R² < 1). Apabila nilai R² semakin besar atau mendekati nilai satu, maka variabel independen memberikan informasi yang baik untuk menjelaskan variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan varian variabel independen terhadap variabel dependennya.

Uji t

Analisis regresi secara univariate dengan menggunakan metode t-test dengan taraf signifikansi 5% untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Analisis regresi secara *univariate* menggunakan uji t dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

Perumusan hipotesis:

H₀ = Dewan independen tidak

memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

H₁ = Dewan independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

H₀ = Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

H₂ = Komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

H₀ = Kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ = Kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidan*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Ringkasan Hasil Uji Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Avoidance</i>	488	0,0002	0,6033	0,2578	0,1090
<i>Dewan Independen</i>	488	0,1667	0,8	0,4028	0,1077
Komite Audit	488	2	6	3,08	0,408
Kualitas Audit	488	0	1	0,4	0,490

Sumber : Data diolah

Analisis Deskriptif

Tabel 2 merupakan ringkasan hasil uji statistik deskriptif dewan independen, komite audit, kualitas audit dan *tax avoidance*.

Tax avoidance menunjukkan bahwa nilai minimum *tax avoidance* sebesar 0,0002 dari 488 sampel perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh PT. Eratex Djaya pada tahun 2014. Perusahaan yang memiliki nilai *GAAP-ETR* yang rendah maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang tinggi karena nilai beban pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Sedangkan presentase nilai maksimum *tax avoidance* sebesar 60,33% dari 488 sampel perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh PT Indo Rama Synthetic pada tahun 2013.

Dewan independen menunjukkan bahwa nilai minimum dewan independen sebesar 0,1667 dari 488 sampel perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya Beton pada tahun 2015 dengan jumlah dewan independen sebanyak 1 dari 6 dewan komisaris. Perusahaan manufaktur yang memiliki jumlah minimum pada dewan independen

menunjukkan bahwa proporsi dewan independen dalam perusahaan lebih sedikit dibandingkan jumlah dewan komisaris. Sedangkan persentase nilai maksimum dewan independen sebesar 0,8000 dari 488 sampel perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh dua perusahaan dengan beberapa tahun yaitu PT Unilever Indonesia pada tahun 2013, pada tahun 2015, pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 dengan jumlah dewan independen sebanyak 4 dari 5 dewan komisaris dan PT. Suparma pada tahun 2014, pada tahun 2016 dan pada tahun 2017.

Komite audit menunjukkan nilai minimum pada sampel penelitian ini sebesar 2 yang dimiliki oleh beberapa perusahaan manufaktur yaitu PT. Mulia Industrindo pada tahun 2013, PT Martina Berto pada tahun 2013, pada tahun 2014, dan pada tahun 2016, PT Titan Kimia Nusantara dan PT Merck pada tahun 2014, PT. Pelangi Indah Canindo dan PT. Mustika Ratu pada tahun 2015 dan pada tahun 2017, dan PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia pada tahun 2017. Sedangkan persentase nilai maksimum pada komite audit sebesar 6 yang dimiliki oleh PT Semen Gresik.

Kualitas audit menunjukkan bahwa nilai minimum 0 dari 488 sampel perusahaan yang dimiliki 72 perusahaan manufaktur pada tahun 2013, 78 perusahaan manufaktur pada tahun 2014, 79 perusahaan manufaktur pada tahun 2015, 79 perusahaan manufaktur pada tahun 2016, dan 91 perusahaan manufaktur pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum sebesar 1.

Pengujian Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Penggunaan analisis regresi linier berganda tidak lepas dari persamaan, maka persamaan regresi yang digunakan harus bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimated) dimana maksud dari BLUE tersebut adalah pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias

Uji Normalitas

Hasil uji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dimiliki sebesar 0,000 kurang dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data residual tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak ada multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Hasil uji pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,415 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel pada periode t

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel independen lebih dari 0,05 sehingga variabel dewan independen, komite audit dan kualitas audit tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier*

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	488
<i>Test Statistic</i>	0,196
<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>	0,000

Sumber : Data diolah

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
Dewan Independen (X1)	0,999	1,001
Komite Audit (X2)	0,979	1,022
Kualitas Audit (X3)	0,980	1,021

Sumber : Data diolah

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>	0,415

Sumber : Data diolah

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	0,000
Dewan Independen (X1)	0,442
Komite Audit (X2)	0,067
Kualitas Audit (X3)	0,939

Sumber : Data diolah

Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut ini hasil rangkuman dari analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 24, perumusan yang dibuat adalah : $ETR = 0,333 - 0,058 DI - 0,019 KA_1 + 0,020 KA_2 + e$

Ringkasan hasil analisis regresi diatas diuraikan sebagai berikut :

α = Konstanta (α) menunjukkan sebesar 0,333 sehingga menggambarkan bahwa variabel independen (dewan independen, komite audit dan kualitas audit) dianggap konstan sehingga *tax avoidance* sebagai variabel dependen akan bertambah sebesar 0,333

β_1 = Koefisien regresi dewan independen sebesar -0,058 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan pada variabel dewan independen sebesar satu satuan dan jika variabel lainnya tetap, maka *tax avoidance* akan menurun sebesar -0,058.

β_2 = Koefisien regresi komite audit sebesar -0,019 menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan pada variabel komite audit sebesar satu satuan dan jika variabel lainnya tetap, maka *tax avoidance* akan menurun sebesar -0,019

β_3 = Koefisien regresi kualitas audit sebesar 0,020 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada variabel kualitas audit sebesar satu satuan dan jika variabel

lainnya tetap, maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,020

Uji F

Hasil uji F atau Anova pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F hitung 2,482 dengan probabilitas 0,060, karena tingkat probabilitas lebih tinggi dari 0,05, yang memiliki arti bahwa dewan independen, komite audit dan kualitas audit secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan model regresi dalam penelitian ini dikatakan tidak fit, sehingga H_0 diterima.

Uji R²

Hasil Uji R² pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai adjusted R² adalah 0,009, hal ini memiliki arti bahwa 0,9% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu dewan independen, komite audit, dan kualitas audit, sedangkan sisanya sebesar 99,1 % dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model dalam penelitian ini.

Uji t

Pada Tabel 9 menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dewan independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan-perusahaan manufaktur

di Bursa Efek Indonesia pada tingkat signifikansi sebesar 5 persen (0,05).

Tabel 7
Hasil Analisis Uji F

Model	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	2,482	0,060

Sumber : Data diolah melalui SPSS

Tabel 8
Hasil Analisis Uji R²

Model	<i>Adjusted R square</i>
1	0,009

Sumber : Data diolah melalui SPSS

Tabel 9
Hasil Analisis Uji t

Model	T	Sig.	Hipotesis.
<i>(Constant)</i>	8,100	0,000	-
DI (X ₁)	-1,279	0,201	H ₁ ditolak
KA (X ₂)	-1,598	0,111	H ₂ ditolak
Kualitas Audit (X ₃)	1,987	0,047	H ₃ diterima

Sumber : Data diolah melalui SPSS

Berdasarkan Tabel 9 dan hipotesa yang telah dibuat maka dapat diuraikan:

Variabel Dewan Independen (DI)

Berdasarkan perhitungan diperoleh tingkat signifikansi t sebesar 0,201, nilai ini dibawah 0,05, yang berarti H₀ diterima dan H₁ ditolak pada tingkat signifikansi 5 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Independen (DI) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel Komite Audit (KA₁)

Berdasarkan perhitungan maka diperoleh tingkat signifikansi t sebesar 0,111, nilai ini di atas 0,05, yang berarti H₀ diterima dan H₂ ditolak pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Komite Audit (KA₁) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

Variabel Kualitas Audit (KA₂)

Berdasarkan perhitungan maka diperoleh tingkat signifikansi t sebesar 0,047 nilai ini dibawah 0,05 yang berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima pada tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kualitas Audit (KA₂) memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Independen terhadap Tax Avoidance

Pada hasil penelitian ini dewan independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggungjawab dewan independen tidak dapat dilakukan dengan maksimal ketika adanya kelemahan tingkat independensi yang dimiliki oleh dewan independen, terdapat pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan independen

sehingga dapat mengakibatkan keterbatasan dewan independen dalam memantau proses keterbukaan dan mendapatkan informasi yang terdapat pada perusahaan serta adanya kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila hal tersebut terjadi maka akan memberikan kesempatan perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak beretika baik dalam kegiatan operasional termasuk dalam melakukan kegiatan *tax avoidance*.

Selain itu, menurut Yuniarwati *et al.*, (2017) menyatakan bahwa pihak yang memiliki peran penting dalam suatu perusahaan adalah pemegang saham dan pengambilan keputusan tertinggi terdapat pada pemegang saham sehingga peran dewan independen tidak terlalu dominan. Apabila keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan rapat RUPS cenderung tidak beretika baik dan meminta direksi untuk melakukan tindakan yang tidak beretika termasuk melakukan tindakan kegiatan *tax avoidance* maka dewan independen tidak mampu mencegah hal tersebut.

Banyaknya dewan independen pada perusahaan rata-rata cenderung rendah dikarenakan perbandingan nilai *mean* yang lebih mendekati nilai minimum dibandingkan nilai maksimum. Nilai dewan independen yang rendah diakibatkan oleh perbandingan jumlah dewan komisaris yang mendominasi dibandingkan jumlah dewan independen pada perusahaan sehingga dapat mengendalikan dewan independen dalam melakukan tugas dan tanggungjawab.

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Fitri (2015) menyatakan bahwa apabila komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung akan lebih efisien namun apabila pengalaman yang dimiliki anggota komite

audit minim maka akan mempengaruhi kualifikasi dari komite audit yang terletak pada kecerdasan, *common size* dan tingkat independensi. Jika tingkat kualifikasi rendah maka akan berdampak buruk dalam melakukan fungsi audit pada perusahaan, sehingga semakin besar kesempatan perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Jumlah komite audit pada perusahaan manufaktur rata-rata cenderung rendah dikarenakan perbandingan nilai *mean* yang mendekati nilai minimum dan menggambarkan bahwa rendahnya komite audit tidak dapat mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan rendahnya komite audit akan mempengaruhi hasil audit yang dilakukan dan dapat mempengaruhi pengawasan dan pengevaluasian terhadap *control* perusahaan dalam kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, fungsi dari komite audit hanya mengontrol perusahaan namun tidak dalam pengambilan keputusan karena keputusan hanya diambil oleh *chairman* dalam perusahaan. Perusahaan dengan komite audit yang diimbangi dengan banyaknya kualifikasi yang baik akan dapat mengontrol *chairman* dalam pengambilan keputusan terutama keputusan atas tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan KAP yang termasuk *The big four* merupakan tempat yang memberikan pelayanan jasa audit yang memiliki kualitas tinggi dibandingkan KAP yang termasuk *non big four* sehingga auditor yang berasal dari *the big four* dianggap dapat mempertahankan tingkat independensi sepanjang pelaksanaan audit dan independensi dalam profesional, serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemakai

laporan keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* (*Power Waterhousecooper* atau PWC, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst and Young*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan KAP *non big four* sehingga dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan kegiatan *tax avoidance*.

Selain itu, menurut Waluyo (2017) menyatakan bahwa apabila laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *the big four* dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP *non big four* dikarenakan auditor yang berasal dari *The big four* dianggap telah memenuhi standar pengauditan yang telah ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik serta dianggap mampu membatasi praktik manajemen laba dikarenakan telah mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam melakukan audit dibandingkan KAP *non big four* sehingga mampu mencegah adanya praktik *tax avoidance*.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang meliputi dewan independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *tax avoidance* di Indonesia secara simultan tidak dipengaruhi terhadap dewan independen, komite audit dan kualitas audit, namun kualitas audit secara parsial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2013-2017

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu dewan independen, komite audit, dan kualitas audit, terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu variabel kualitas audit. Hal ini dikarenakan KAP yang termasuk dalam *big four* merupakan tempat yang memberikan

pelayanan jasa audit yang memiliki kualitas tinggi dan telah mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam melakukan proses audit.

Hasil Uji R² menunjukkan bahwa nilai variabel independen hanya mampu menjelaskan 0,9 % variabel dependen, sedangkan sisanya 99,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Variabel diluar penelitian yang dimaksud diantaranya *leverage*, *profitabilitas*, dan kepemilikan institusional

Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti diantaranya :

Penelitian ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal dan terjadi model tidak fit, hal ini dikarenakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini yaitu komite audit dalam laporan keuangan tahunan cenderung memiliki data yang tidak bervariasi yaitu bernilai 3. Penelitian ini juga didasarkan pada sumber data sekunder. Data sekunder untuk perusahaan manufaktur di Indonesia diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia sehingga terdapat beberapa perusahaan yang dikeluarkan dari sampel terdapat ketidaklengkapan data perusahaan tersebut sehingga peneliti harus melakukan eliminasi data atau pembuangan data.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

Ketika peneliti menghadapi data tidak berdistribusi normal, sebaiknya melakukan *outlier* hingga data menunjukkan berdistribusi normal sehingga kemungkinan penelitian terjadi model yang fit dan data berdistribusi normal. Peneliti selanjutnya apabila mengambil topik yang sejenis, sebaiknya menggunakan variabel independen yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan seperti *leverage* atau tingkat hutang, dan profitabilitas. Untuk penelitian selanjutnya, apabila memilih topik yang sejenis disarankan juga untuk menggunakan metode pengukuran *tax avoidance* yang berbeda, sehingga peneliti selanjutnya dapat membandingkan hasil penelitian dengan

topik yang sama, namun metode pengukuran variabel yang digunakan berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, H. (2007). *"Manajemen Keuangan Bisnis"*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Andriyani, N. (2008). Pengaruh *Investment Opportunity Set (IOS)*, Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Leverage pada Kualitas Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Anthony, R., & Govindarajan, V. (2009). *Management Control System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan,. (2014, December). <http://www.bapepam.go.id/>.
- Damayanti, F., & Tridahus, S. (2015). Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5 (2). Hal 199-201.
- Darussalam, & Septriadi, D. (2009). Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule. *Ortax*. Retrieved from, <http://www.ortax.org/>. Davies, A. (2006).
- Desai, M., & D. Dharmapala. (2006). "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives". *Journal of Financial Economics* 79 (2006). Hal 145-179.
- Fenny, W. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review* 4(1)
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). Sebuah Tinjauan Penelitian Pajak. In *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 50 (2-3). Hal 127-178.
- Imam, G. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011. *Standar Professional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Teori Firm: Manajerial Perilaku, Biaya Agency dan Kepemilikan Struktur. *Jurnal Ekonomi Keuangan* 3 (4). Hal 305-360.
- KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta:. *Komite Nasional Kebijakan Governance*.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal account. Public Policy*, Hal 86-108.
- Pohan, H. (2008). Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Pada Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti*.
- Reza, J. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4). Hal 638-644.
- Riyanto S. Suharsono. 2018. "Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern". *Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Akuntansi, Keuangan dan Pajak*. Volume 2, No. 1 Januari. Hal 35-48
- Rusydi, M., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Sari, D., & Martini, D. (2010). Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness. *Disajikan dalam The 3rd Accounting & The 2nd Doctoral Colloquium*. Bali: Universitas Indonesia.
- Vivi Adeyani , T., & Winnie . ((2016)). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013 . *Asian Journal of Accounting Research 1*. Hal 28 – 38
- Waluyo . (2017 , December). *The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance: Empirical Study Of The Indonesian Banking Company*. *The Accounting Journal of BINANIAGA, Vol. 02, No. 02*.
- Watts, R., & Zimmerman, J. (1983). Badan Masalah, Auditing, dan Teori Firm: Beberapa Bukti. *Jurnal Hukum dan Ekonomi 26 (3)*. Hal 613-633.
- Winarsih, R., P., & Kusufi, M. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Perusahaan Sosial Tanggung Jawab Terhadap Tindakan Pajak Agresif: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Tahun 2009-2012. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Yuniarwati, I, C. A., Sofia, P. D., & Caroline, L. (2017, Oct). Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review 16*. Hal 510-517.
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). Pengaruh Dewan Karakteristik Direksi pada Agresivitas Pajak. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi 4 (4)*. .
- <https://www.pajak.go.id>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim>
- <https://www.kaskus.co.id/thread/00000000000000000011130821/big-four-kantor-akuntan-publik-kap/>
- <https://finance.detik.com/industri/d-4028491/industri-manufaktur-setor-pajak-rp-103-triliun>